

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh :

Khusnul Ma'rifad

NIM. C95215084



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khusnul Ma'rifad
NIM : C95215084
Fakultas/Jurusan prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Khusnul Ma'rifad

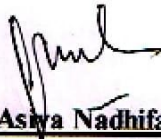
NIM. C95215084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Ma'rifad NIM C95215084 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dismunasahkan.

Surabaya, 13 Maret 2019

Pembimbing



Hj. Nurul Asy'ra Nadhifah, M.HI

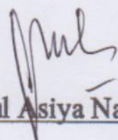
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Khusnuk Ma'rifad NIM. C95215084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

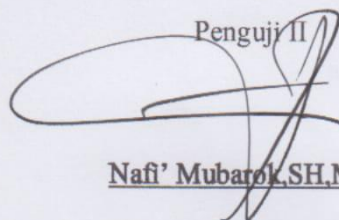
Penguji I



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP.197504232003122001

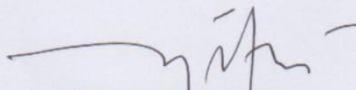
Penguji II



Nafi' Mubarak, SH, MHI.

NIP. 197404142008011014

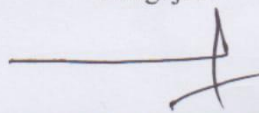
Penguji III



Suyikno, S.Ag, MH

NIP.197307052011011001

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si

NIP. 1988608162015031003

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Ma'rifad
NIM : C95215084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : khusnulmarifad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

Khusnul Ma'rifad

Bedasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, Dana Desa setiap Kabupaten/Kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana di alokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, dan kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa.

Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambiran memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 55.

Siyāsah (Studi kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo). Di skripsi ini mengacu pada strategi dan rencana-rencana dan tujuan-tujuan untuk perencanaan Pembangunan Desa, sedangkan di proposal ini membahas tentang pengawasan Pengelolaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

3. Skripsi oleh Randhi Dian Purnama dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa). Di skripsi ini membahas tentang peran dan mekanisme Badan permusyawaratan Desa (BPD) secara hukum positif mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 , sedangkan di Proposal ini membahas tentang Pengawasan pengelolaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan secara *fiqh Siyasah*.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan adalah segi analisis *fiqh siyasah*, sebuah penelitian yang belum disentuh peneliti yang lain berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Kemudian bab kedua, merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yakni *Fiqh Siyāsah*, dimana dalam proposal ini menggunakan teori *fiqh duṣṭūriyah* yang membahas mengenai legislasi (*al-sulṭhāh al-tasyri'iyah*) yang berwenang untuk mengawasi keuangan negara dan *Ahl Al-Hallī Wal 'Aqdi* lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait tentang fungsi pengawasan pengelolaan dana desa Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan *Siyāsah Malīyah* merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi terkait Desa Gambiran Kecamatan Prigen

Kabupaten Pasuruan, berupa sejarah Desa, kondisi Desa, pendapatan Desa, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis fungsi pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengelolaan Dana Desa.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqh siyāsah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya majlis ini yaitu: Pertama, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan. Kedua, rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu megemukakan pendapat dalam musyawarah, hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas jika seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah, sipastikan musyawarah tersebut todak dapat terlaksana. Keempat, kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. Kelima, kewajiban taa kepada *ulil al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh

secara tertulis kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa)paling lambat 3 (tiga) bulan akhir tahun anggaran.

- 2) Pasal 51 ayat 2 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Di garis bawah mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Tentu masih ingat bahwa APBDes merupakan salah satu contoh peraturan desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
- 3) Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan, supaya peraturan desa dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauh mana pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ada beberapa kegiatan di dalam peran dan fungsi Badan Permuayawaratan Desa (BPD) selain pengawasan

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien, guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. BPD adalah perwakilan masyarakat desa diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dari pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama melalui RPJM-Desa apakah dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan ketetapan bersama dalam musyawarah.

- c) Pemantauan, kesadaran (*awareness*) adalah tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan tau menjauh dari itu. BPD sebagai pelaksana pengawasan peraturan desa dan ketetapan desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu juga menerapkan dan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan. Dalam hal pemantauan, pihak BPD tidak dilibatkan secara penuh dalam pemantauan pelaksanaan program-program yang telah tertera di dalam RPJM-Desa, terkesan pemerintah desa

atau dalam hal ini Kepala Desa berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak terjadi koordinasi atau tidak terjalin kerja sama pada kedua lembaga pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya dilibatkan pada saat pembahasan alokasi dana desa saja.

- d) Evaluasi, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes. BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga untuk kedepan berjalan secara efektif dan efisien, dimana antara pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa dapat bekerja secara profesional dalam pembangunan desa, dan target-target pembangunan tercapai sesuai dengan RPJM-Desa yang telah disepakati dan ditetapkan bersama unsur penyelenggara pemerintah desa.
- e) Supervisi, yakni program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar memastikan bahwa tujuan perusahaan atau pemerintahan dan rencana yang dirancang

Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa BPD Desa Gambiran mengambil upaya pengawasan administratif dan riil di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musrenbangdes dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian BPD mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk dalam skala 1 (meliputi pembangunan jalan), skala 2 (pembangunan irigasi), skala 3 (piparisasai) kemudian di serahkan terhadap perangkat Desa yang berwenang. Tingkat Perencanaan pembangunan dilakukan saat musrenbangdes kemudian dibawa ke tingkat musrenbangdes dan ditentukan skala prioritas 1 2 3 dan dilaksanakan oleh perangkat Desa. Setiap Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbangdes harus membawa misi masing-masing dari setiap dusun untuk diperjuangkan. Karena Badan Permusyawaratan Desa berangkat dari tujuan yang sama yakni memberikan hak-hak masyarakat maka diperlukan BPD yang tidak hanya menjadi pelengkap lembaga saja melainkan mampu kritis dalam menyikapi apa yang diharapkan masyarakat atau persoalan dalam masyarakat. Kemudian di tunjuk TPK (tim pekerja lapang) untuk melalukan pemabangunan atau pengelolaan Dana Desa dilapangan. Setelah di lapangan pun BPD wilayah di tunjuk langsung untuk mengawasi penggunaan atau pun pengeleolaan Dana Desa di wilayah masing-masing guna terhindarnya pihak-pihak yang ingin menyelewengakan Dana Desa ,tetapi Badan permusyawaratan Desa (BPD)

selaku pelaksana pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan Negara seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014, dan *siyāsah māliyah* yakni *Baitul māl* karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.

B. Saran

Menyikapi banyak terjadinya penyimpangan Dana Desa Badan Permasyarakatan Desa diharapkan lebih kritis bukan hanya melengkapi sebuah kelembagaan saja agar tidak hanya melakukan pengawasan secara tertulis ataupun global melainkan dengan cara-cara yang riil dan berinisiatif sehingga mampu menghambat terjadinya penyimpangan di Desa Gambiran. Masyarakat juga di himbau untuk dilibatkan mengawasi jika ada Pengelolaan Dana Desa di Dusun masing-masing misal pembangunan jalan agar mereka tau apa yang di usulkan terbukti secara nyata. Upaya agar Desa Gambiran lebih sejahtera maka yang diberlakukan Pengelolaan Dana Desa jangan difokuskan dalam Pembangunan Infrastruktur kalau bisa pemberdayaan masyarakat secara merata. Dan Pemerintah Desa diharapkan tidak mendahului mengajukan LKPJ jika belum disetujui oleh BPD, karena BPD berhak untuk menyetujui atau tidaknya LKPJ tersebut.

